

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abbas, Syahrizal, 2009, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, & Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana.
- Goospaster, Gary, 1993. *Negosiasi dan Mediasi di Indonesia: Sebuah Pedoman Negosiasi dan Penyelesaian Sengketa Melalui Negosiasi*, Elips Prpject, Jakarta.
- Harahap, M. Yahya, 2006, *Hukum Acara Perdata, tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Jakarta; Sinar Grafika.
- Hasan Shadily. 2003. *Kamus Inggris Indonesia*, cet. Ke XXV, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Mahkamah Agung, JICA, dan IICT, 2008, *Buku Tanya-Jawab Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan*, Jakarta.
- Margono, Suyud, 2006, *ADR (Alternative Dispute Resolution) & Arbitrase proses pelembagaan dan aspek hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Mertokusumo, Sudikno, 2005, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.
- Rahmadi, Takdir, 2010, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Soemartono, Gatot, 2006, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, 1988, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Usman, Rachmadi, 2003, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

## **B. Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009.

Undang-undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum diubah dengan Undang-undang No. 8 Tahun 2004 dan Undang-undang No. 49 Tahun 2009.

Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian sengketa.

Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

*Het Herzeine Indonesische Reglement (HIR), staatsblaad 1848 NO. 44*

Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Pedoman Perilaku Mediator, ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung pada tanggal 11 Februari 2010.

